

## **ABSTRACT**

### **USAGE MONITORING COORDINATION PATTERN VILLAGE FUNDS (Case Study From Pancasila Village, Natar Sub-district, South Lampung District)**

**BY**

**ROBBY PUTRA INDARSYAH**

Law no. 6 of 2014 village fund aims to improve villagers' welfare and human life quality and poverty alleviation by fulfilling basic needs. Village funds are channeled by the central government to overcome poverty and reduce inequalities among people, increasing the quality of life of villagers. Pancasila village as the village misused the village funds; the above problems constitute a lack of coordination from the PMDT Office of Lampung Province and the South Lampung Office of PMD. This study adopts a negative methodology that uses a qualitative approach. The technique of data collection on this research is observation, interview and documentation. This research result is that true lack of coordination especially the South Lampung PMD Office did not focus on managing empowerment and development so that coordination on village funds was not misused.

Keyword: Coordination, Village Funds, Village Head

## **ABSTRAK**

### **POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)**

**Oleh**

**ROBBY PUTRA INDARSYAH**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dana desa disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Desa Pancasila sebagai desa yang mensalahgunakan dana desa tersebut. permasalahan diatas merupakan kurangnya koordinasi dari Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Dinas PMD Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa benar kurangnya koordinasi terutama Dinas PMD Lampung Selatan tidak fokus mengurus pemberdayaan dan pembinaan agar koordinasi tentang dana desa tidak disalahgunakan.

Kata Kunci : Koordinasi, Dana Desa, Kepala Desa